



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 132/KPT.W11-U/SK.OT1.6/IV/2026**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN
SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 270/DJU/SK.OT1.6/III/2026
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 tanggal 28 Mei 2026 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja dan pelayanan peradilan bagi masyarakat di Pengadilan Tinggi Bandung dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan sebagai Pedoman Kerja ;
- bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara dan layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar terwujud tata kerja administrasi peradilan yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin;
- bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan untuk Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan sesuai dengan pembaruan SOP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Mengingat ...



- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

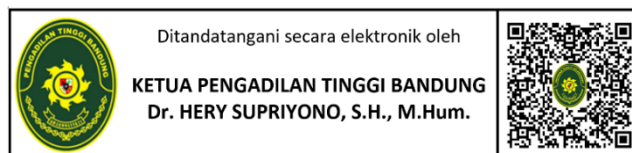
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

KESATU:...



- KESATU** : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 tanggal 28 Mei 2026 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- KEDUA** : Menetapkan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan harus dijadikan pedoman oleh Aparatur pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi :
1. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di satuan kerja masing-masing;
 2. Selanjutnya hasil kegiatan monitoring dievaluasi dan disusun dalam suatu laporan yang terstruktur dan sistematis setahun sekali serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui link <https://s.id/MonevSOPDitjenBadilum> sebagai dasar untuk melakukan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 April 2026



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Pemberlakuan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan
Layanan Pengadilan Sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 Pada Pengadilan
Tinggi Bandung

Nomor : 132/KPT.W11-U/SK.OT1.6/IV/2026



Tanggal : 7 April 2026

**DAFTAR INDUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	586/DJU/OT1.6/III/2026
2	SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PT	587/DJU/OT1.6/III/2026
3	SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN	588/DJU/OT1.6/III/2026
4	SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN	589/DJU/OT1.6/III/2026
5	SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/4 BULANAN/ 6 BULANAN/ TAHUNAN)	590/DJU/OT1.6/III/2026
6	SOP PEMINJAMAN DAN PENGAMBILAN ARSIP BERKAS PERKARA	591/DJU/OT1.6/III/2026
7	SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS	592/DJU/OT1.6/III/2026
8	SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI	593/DJU/OT1.6/III/2026
9	SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA	594/DJU/OT1.6/III/2026
10	SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TINGKAT BANDING	595/DJU/OT1.6/III/2026
11	SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI TINGKAT BANDING	596/DJU/OT1.6/III/2026
12	SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING	597/DJU/OT1.6/III/2026
13	SOP PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA ANAK SECARA ELEKTRONIK	598/DJU/OT1.6/III/2026
14	SOP PENYELESAIAN UPAYA HUKUM BANDING PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA ELEKTRONIK	599/DJU/OT1.6/III/2026
15	SOP PENYUMPAHAN ADVOKAT	600/DJU/OT1.6/III/2026



NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
16	SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK	601/DJU/OT1.6/III/2026
17	SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 107 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP TINGKAT BANDING KE MAHKAMAH AGUNG	602/DJU/OT1.6/III/2026
18	SOP PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 107 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP OLEH PT ATAS PERMOHONAN PN	603/DJU/OT1.6/III/2026
19	SOP PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN PASAL 105 AYAT (1) JO PASAL 291 AYAT (2) DAN PASAL 105 AYAT 2 KUHA	604/DJU/OT1.6/III/2026
20	SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 107 AYAT (1), (2) DAN (3) KUHAP OLEH PT ATAS PERMOHONAN PN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	605/DJU/OT1.6/III/2026
21	SOP PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN PASAL 105 AYAT (1) JO PASAL 291 AYAT (2) DAN PASAL 105 AYAT 2 KUHAP SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	606/DJU/OT1.6/III/2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.




Dokumen ini ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Identitas Dokumen Elektronik: 291d3c01-85ad-4852-b7cf-12bb58ecbf66